



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD) KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2025

1. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Capaian Kinerja makro yang diperoleh oleh Kabupaten Kolaka pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO	TAHUN 2024	TAHUN 2025	Perubahan (%)
1	Indeks Pembangunan Manusia	76,20	76,92	0,94
2	Persentase Penduduk Miskin	11,67	10,19	-12,68
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,59	2,25	-13,13
4	Pertumbuhan Ekonomi	5,06	6,96	37,55
5	PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	153,41 Juta rupiah	160,80 Juta rupiah	4,82
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,272 Poin	0,286 Poin	5,15

Sumber :1. BPS Kolaka, 2026

Pada tahun 2025, Kabupaten Kolaka menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan dalam berbagai indikator makro pembangunan. Capaian ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam mendorong kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

1. Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people's choices*) untuk meningkatkan kualitas hidup, yang berfokus pada pembangunan manusia sebagai tujuan akhir, bukan hanya sarana ekonomi. Pendekatan ini menekankan peningkatan kapabilitas manusia, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, serta standar hidup





layak. Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam Upaya kualitas hidup manusia (Masyarakat/penduduk). Capaian IPM Kabupaten Kolaka terus mengalami peningkatan dari 76,20 pada tahun 2024 menjadi 76,92 pada tahun 2025. Peningkatan ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kualitas hidup dan standar pembangunan manusia di bidang pendidikan, kesehatan, dan penghasilan. Hal ini juga mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan dasar bagi masyarakat.

2. Persentase Penduduk Miskin

Persentase tingkat kemiskinan di Kabupaten Kolaka mengalami penurunan dari 11,67% pada tahun 2024 menjadi 10,19% pada tahun 2025. Capaian ini menunjukkan tren positif dalam upaya pengentasan kemiskinan. Penurunan yang cukup signifikan ini mengindikasikan tercapainya program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam mengurangi jumlah penduduk miskin. Faktor utama yang mendukung penurunan tingkat kemiskinan adalah Kebijakan pro-rakyat dan program-program sosial yang tepat sasaran.

3. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap Angkatan kerja. Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Kolaka mengalami penurunan signifikan dari 2,59% pada tahun 2024 dan tahun 2025 menjadi 2,25%. Penurunan tingkat pengangguran ini menunjukkan bahwa lapangan kerja semakin tersedia, baik di sektor formal maupun informal. Program pelatihan dan penciptaan lapangan kerja baru oleh pemerintah daerah tampaknya memberikan dampak positif.

4. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi daerah adalah proses kenaikan nilai tambah (Produk Domestik Regional Bruto/PDRB) riil secara keseluruhan yang dihasilkan oleh berbagai aktivitas ekonomi di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Ini mencerminkan peningkatan pendapatan masyarakat dan kemakmuran daerah, yang seringkali dipengaruhi oleh faktor sumber daya, keterbukaan daerah, dan kebijakan program yang dihasilkan. Capaian Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kolaka tercatat tumbuh 6,96% pada tahun 2025 atau mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 5,06%. Peningkatan capaian pertumbuhan ekonomi dapat memberikan dampak pada pembukaan lapangan kerja baru, meningkatkan daya saing daerah, dan meningkatkan pendapatan riil masyarakat.

5. PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)

PDRB per kapita naik dari Rp 153,41 juta menjadi 160,80 juta, meningkat Rp 7,39 juta (sekitar 4,82%). Ini menandakan nilai ekonomi rata-rata per penduduk meningkat, walau tidak otomatis berarti semua kelompok merasakan kenaikan yang sama.





6. Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)

Capaian Gini Ratio sebesar 0,272 poin pada tahun 2024 menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat berada pada kategori rendah, yang mencerminkan kondisi pemerataan pendapatan yang relatif baik. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pelaksanaan program pembangunan telah memberikan manfaat yang cukup merata kepada berbagai lapisan Masyarakat, sedangkan pada tahun 2025 Gini Ratio meningkat menjadi 0,286 poin, yang menunjukkan adanya kenaikan tingkat ketimpangan dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun demikian, nilai tersebut masih berada dalam batas ketimpangan yang relatif terkendali. Peningkatan ini terjadi pada masyarakat menengah ke atas atau desil 5 ke atas, untuk menengah ke bawah atau desil 5 ke bawah telah tercipta pemerataan pendapatan dan menikmati dampak kenaikan laju pertumbuhan ekonomi daerah.

Secara keseluruhan, capaian Gini Ratio tahun 2024–2025 menunjukkan bahwa pemerataan pendapatan masih terjaga, namun terdapat tantangan dalam menjaga agar pertumbuhan ekonomi tetap inklusif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan pembangunan yang berorientasi pada pemerataan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta perluasan akses ekonomi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah agar ketimpangan dapat ditekan pada tahun-tahun berikutnya.

Secara umum, capaian indikator makro Kabupaten Kolaka pada tahun 2025 ini menunjukkan langkah yang signifikan dalam berbagai aspek pembangunan ekonomi dan sosial, meskipun dengan beberapa tantangan seperti Peningkatan IPM, Persentase Penduduk Miskin, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat semakin membaik.

2. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR

Capaian kinerja urusan pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar, termasuk diantaranya :

1. Urusan Pendidikan

A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan pendidikan yang diperoleh Kabupaten Kolaka pada tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :





No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	56,28 %	
	Persentase Anak Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam PAUD		68,57 %
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	92,28 %	
	Persentase Anak Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar		92,02 %
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	85,06%	
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan		97,54 %
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	98,97%	
	Persentase Toilet Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam Kondisi Baik		72,02%
5	Persentase Ruang Kelas Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Dalam Kondisi Baik		72,99%

B. Realisasi Belanja Urusan Pendidikan

Untuk mendukung ketercapaian sasaran startegis sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025 tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka mengalokasikan Total pagu anggaran sebesar Total pagu anggaran sebesar Rp. 384.486.573.061,- dengan Realisasi anggaran sebesar Rp. 360.008.827.800,- (93.63%) yang terbagi dalam 6 Program yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka, dengan rincian sebagai berikut :

Alokasi Anggaran Per-Program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kolaka Tahun 2025

No.	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH		%
		TARGET	REALISASI	
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Rp. 283.541.962.487,-	Rp. 263.020.232.021,-	92,76
02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rp. 89.723.489.674,-	Rp. 86.841.964.651	96,79





Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Kolaka Tahun 2025

03	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rp. 1.472.107.000	Rp. 1.188.992.208,-	80,77
04	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Rp. 2.694.375.000,-	Rp. 1.957.291.520,-	72,64
05	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Rp. 316.912.000,-	Rp. 304.201.900,-	95,99
06	PROGRAM PELESTRIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Rp. 6.737.726.900,-	Rp. 6.696.145.500,-	99,38
JUMLAH		Rp. 384.486.573.061,-	Rp. 360.008.827.800,-	93,63

C. Permasalahan yang dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi pada urusan pendidikan di Kabupaten Kolaka tahun 2025 antara lain sebagai berikut :

1. Waktu pelaksanaan kegiatan sangat terbatas.
2. Realisasi pencairan dana terlambat.

2. Urusan Kesehatan

A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan pendidikan yang diperoleh Kabupaten Kolaka pada tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025
1	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	1,3%	
	Persentase Angka Kematian Ibu		0,15%
2	Persentase RS Rujukan Tingkat Kota yang terakreditasi	50%	
	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita		7,10%
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	73,3%	
	Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar		70,42%
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100%	
	Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar		85,21%
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	
	Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar		85,39%
6	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100%	83,51%
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelkes sesuai standar	93%	
	Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar		85,40%





8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	90,4%	
	Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Sesuai Standar		76,37%
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	74,4 %	
	Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun ke Atas Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		80,27%
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelkes. sesuai standar	89,2%	
	Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar		14,63%
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan Pelkes. sesuai standar	100%	
	Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar		40,33%
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kes. jiwa sesuai standar	60,2%	
	Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		84,71%
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%	
	Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar		100%
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelay. deteksi dini HIV sesuai standar	100%	
	Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus) Sesuai Standar		78,13%

B. Realisasi Belanja Urusan Kesehatan

Dana yang di alokasikan untuk membiayai program/kegiatan SPM bidang kesehatan tahun anggaran 2025 sebesar Rp.8.552.192.615 dan yang sudah direalisasikan sebesar Rp. 5.101.894.647 atau 60,00% dengan program unggulan sebagai berikut :

NO	URAIAN	KEGIATAN		
		ALOKASI	REALISASI	%
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			
	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	4.424.394.215	1.343.600.083	30
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			
	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan	368.832.400	308.020.776	84
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			





	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar	27.230.500	17.985.000	66
4	Pelayanan Kesehatan Balita			
	Jumlah Balita usia 12-23 bulan yang mendapat Pelkes sesuai Standar + Jumlah Balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar + Balita usia 36-59 bulan mendapatkan Pelayanan	1.486.744.500	1.303.860.064	88
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			
	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat Pelkes sesuai standar	527.027.000	503.814.000	96
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			
	Jumlah orang usia 15-59 tahun di kab/kota yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar	371.830.500	361.066.900	97
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			
	Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali	373.634.500	362.205.300	97
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			
	Jumlah penderita hipertensi usia \geq 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan Pelkes sesuai standar	205.279.500	200.734.000	98
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)			
	Jumlah penderita diabetes mellitus usia \geq 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan Pelkes sesuai standar	234.670.500	230.400.000	98
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat			
	Jumlah ODGJ berat yang mendapatkan Pelkes jiwa sesuai standar	244.04.000	218.914.000	90
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			
	Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang	216.057.000	183.691.800	85
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)			
	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	71.988.000	67.602.724	94

C. Permasalahan yang dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi pada urusan Kesehatan di Kabupaten Kolaka Kolaka tahun 2025 antara lain sebagai berikut :

1. Pelayanan Kesehatan ibu hamil , K 1 Akses tinggi dan beberapa ibu hamil K1 mengalami abortus, serta masih ada wilayah kerja





- puskesmas yang berada dipelosok desa yang terpencil. Dan Sebagian puskesmas memiliki sasaran yang tinggi
2. Masih adanya ibu hamil tidak mau lagi berkunjung ke faskes untuk memeriksakan kehamilannya.
 3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir pada laporan SPM belum mencapai target disebabkan karena yang menjadi pembagi adalah estimasi sasaran Bayi baru lahir.
 4. Pelayanan Kesehatan Balita pada laporan SPM tidak mencapai target disebabkan karena yang menjadi pembagi adalah estimasi sasaran /target Balita yang tinggi.
 5. Usia Pendidikan Dasar masih terdapat banyak di luar sekolah sehingga masih ada yang belum terlayani jika screening/yankes di laksanakan di sekolah, Tidak semua sekolah ada kegiatan screening/yankes karena menyesuaikan jumlah anggaran yang tersedia sehingga pelayanan kesehatan tidak bisa untuk semua usia pendidikan dasar, Prog.UKS berserta tim masih belum tepat dalam melaksanakan pencatatan dan pelaporan khususnya fom screening yang terkadang masih kosong dan tidak mengirim laporan tepat waktu dan untuk Form screening usia dikdas tidak disediakan dalam anggaran
 6. Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) capaiannya rendah karena sasaran/target yang terlalu tinggi .
 7. Sasaran/target yang di rekomendasikan untuk menetapkan target/sasaran Kabupaten adalah hasil dari Riset Kesehatan Daerah tahun 2018. ODGJ sebesar 0,13 dari jumlah penduduk di Kabupaten Kolaka. Angka ini masih cukup tinggi sehingga capaian kinerjanya belum tercapai 100 %

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang diperoleh Kabupaten Kolaka pada tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur	23,76%	





Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Kolaka Tahun 2025

	pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten		
	Persentase Kondisi Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota		87%
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten	29,95%	
	Persentase Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota		55,80%
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kab/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	85,17%	
	Persentase Peningkatan Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Terlindungi dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Jumlah Penduduk di Kabupaten/Kota		59,28%
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga diseluruh Kabupaten	62,98%	
	Persentase Jumlah Rumah yang Memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik		98,08%
5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	82,33%	
	Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian dan Mitigasi Banjir		25,22%
6	Rasio kepatuhan IMB Kabupaten	100%	
	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Sepanjang Pantai Kewenangan Kabupaten/Kota		39,86%
7	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	57,32%	
	Persentase Kepatuhan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Kabupaten/Kota		100%
8	Rasio tenaga operator/teknisi /analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	99,16%	
	Persentase Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)		46,94%
9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100%	
	Persentase Tenaga Operator/Teknisi/Analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi		16,67%
10	Persentase Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Berdasarkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang Sudah Diterbitkan di Kabupaten/ Kota		100%





B. Realisasi Belanja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Realisasi belanja urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Kolaka tahun 2025 sebesar Rp. 1.658.060.146,- dengan program unggulan sebagai berikut :

1. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota,
2. Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pada tahun 2025, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kolaka mendapatkan alokasi anggaran dari APBD dan APBN sebesar Rp. 152.665.445.484,00,- Keseluruhan anggaran itu dipergunakan untuk kegiatan Belanja Langsung untuk mendukung kegiatan yang termasuk SPM nasional. Tidak ada kontribusi swasta dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2025. Uraian selengkapnya terdapat sebagai berikut :

Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	3.485.167.000,00	3.126.338.975,00	89,70 %
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	5.778.623.000,00	5.768.173.600,00	99,82 %

Sumber : Bidang Cipta Karya DPUPR Kab. Kolaka, Tahun 2025

C. Permasalahan yang dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Kolaka tahun 2025 antara lain sebagai berikut :

1. Kurangnya sumber daya aparatur dan sarana pada saat pengumpulan data;
2. Kurangnya koordinasi antar Instansi terkait sehingga dalam pencapaian beberapa sasaran SPM sulit terdata;
3. Kurangnya peran aktif Kel / Desa untuk berkoordinasi dengan OPD terkait pelaksana kegiatan yang kemudian Pemerintah Daerah harus menetapkan lokus penerima manfaat kegiatan;
4. Belum adanya data Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Sistem Penyediaan Air Limbah yang bersifat regional / lintas kabupaten / kota;





5. Belum Optimalnya pemberian Anggaran pada Program-program yang masuk dalam SPM Pekerjaan Umum sehingga tidak semua mutu layanan SPM dapat terpenuhi;
6. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup sehat dan kurangnya kedisiplinan mengenai kebersihan sehingga seringkali terjadi permasalahan social maupun masalah kesehatan;

4. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang diperoleh Kabupaten Kolaka pada tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	71,87%	
	Persentase Warga Negara Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Memperoleh Rumah Layak Huni		67,74%
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	0 %	
	Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh di bawah 10 Ha yang Ditangani		55,81%
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/kota yang ditangani	4,06 %	
	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani		11,84%
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	3,09%	
	Persentase Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)		8%
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	31,13 %	

B. Realisasi Belanja Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pada tahun 2025, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kolaka mendapatkan alokasi anggaran dari APBD dan APBN sebesar Rp. 53.031.951.946,-. Keseluruhan anggaran itu dipergunakan





untuk kegiatan Belanja Langsung dan tidak Langsung untuk mendukung kegiatan yang termasuk SPM nasional. Tidak ada kontribusi swasta dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2025. Uraian selengkapnya terdapat berikut :

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp.)	% CAPAIAN
01	02	03	04	05
	Program Pengembangan Perumahan	2.121.238.500	2.098.026.234	98,91
1	Pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota	107.434.500	106.648.658	99,27
	Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program kabupaten/kota	0	0	0
	Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	0	0	0
	Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	49.781.500	49.558.299	99,55
	Pendataan Tingkat kerusakan rumah akibat bencana	0	0	0
	Pendataan dan verifikasi calon penerima rumah bagi korban bencana kabupaten/kota	17.189.000	16.802.279	97,75
	Pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus	40.464.000	40.288.080	99,57
2	Pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/kota	1.345.395.000	1.325.093.373	98,49
	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	223.992.000	203.771.995	90,97
	Penyusunan site plan dan/atau detail Engineering design (DED) bagi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota	0	0	0
	Pengadaan lahan untuk Pembangunan rumah bagi korban bencana	0	0	0





	Pembangunan rumah Bagi Korban Bencana	1.121.403.000	1.121.321.378	99,99
	Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota	0	0	0
	Operasional dan pemeliharaan lingkungan perumahan pada relokasi program kabupaten/kota	0	0	0
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Lainnya	668.409.000	666.284.203	99,68
	Pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah khusus	506.274.000	504.377.933	99,63
	Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian Pembangunan dan pengembangan perumahan	162.135.000	161.906.270	99,86

C. Permasalahan yang dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi pada urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Kolaka tahun 2025 antara lain sebagai berikut :

1. SPM perumahan Rakyat melibatkan beberapa instansi/OPD lain seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sehingga dalam pencapaian beberapa sasaran SPM sulit terdata karena kurangnya koordinasi antar instansi terkait.
2. Belum adanya kepastian lahan ketika akan melaksanakan pembangunan, sehingga banyak kegiatan yang tidak dapat di laksanakan atau membutuhkan tambahan waktu dalam pengerjaan.
3. Kurang tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung sasaran SPM.
4. Masih belum jelasnya tugas pokok dan fungsi dari masing masing Bidang dan adanya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi dari masing masing bidang ataupun dengan instansi lain, sehingga mempersulit pencapaian sasaran SPM.
5. Khusus untuk kegiatan setelah anggaran perubahan banyak yang tidak dapat dilaksanakan akibat keterbatasan waktu.
6. Untuk mencapai sasaran SPM Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kekurangan Sumber Daya Manusia khususnya dalam pengelolaan kegiatan.





5. Urusan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat

A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat yang diperoleh Kabupaten Kolaka pada tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

SATPOL PP DAN DAMKAR KABUPATEN KOLAKA

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	
	Persentase Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang Dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja		100%
2	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	
	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran		100%

BPBD KABUPATEN KOLAKA

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025
1	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	
	Persentase Dokumen Kebencanaan yang Telah Ditetapkan dan Masih Berlaku		66,67%
2	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiap siagaan terhadap bencana	0,17%	
	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		100%
3	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	
	Persentase Jumlah Warga Negara yang Mendapatkan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		100%





B. Realisasi Belanja Urusan Ketenteraman Umum dan Perlindungan Masyarakat

Realisasi belanja urusan Trantibum pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (SATPOL PP dan DAMKAR) di Kabupaten Kolaka tahun 2025 sebesar Rp. 2.570.450.759,- dengan program unggulan sebagai berikut :

1. Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum,
2. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran.

Realisasi belanja urusan Trantibum pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Kolaka tahun 2025 sebesar Rp. 1.629.945.169,- dengan program unggulan sebagai berikut :

1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana,
2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana,
3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.

C. Permasalahan yang dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi pada urusan Trantibum pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (SATPOL PP dan DAMKAR) di Kabupaten Kolaka tahun 2025 antara lain sebagai berikut :

1. Kurangnya kendaraan patroli Pol PP sehingga tidak dapat menjangkau wilayah kecamatan lain diluar wilayah kecamatan perkotaan;
2. Peran serta Satlinmas di tiap-tiap Desa dan Kelurahan belum optimal dalam menjaga keamanan dan ketertiban di desa/kelurahan;
3. Jumlah personil Damkar yang memenuhi Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran masih sangat minim, sampai tahun 2025 hanya ada 4 (empat) orang;
4. Mengingat pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan trantibum dan linmas adalah tindakan taktis sehingga keterbatasan aparatur yang memiliki kemampuan taktis menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas operasional lapangan. Kualifikasi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah :
 - a) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
 - Kurangnya jumlah PPNS yang hanya berjumlah 2 (dua) orang.
 - b) Tenaga profesional Personil Pemadam Kebakaran.





- Tidak adanya personil pemadam kebakaran yang memiliki kualifikasi khusus dalam perencanaan dan penanganan kebakaran pemukiman maupun kebakaran lahan/hutan.
- c) Analisis Hukum dan peraturan perundang-undangan.
 - Tidak adanya analisis hukum pada Sat Pol PP Kab. Kolaka.
- 5. Terbatasnya sarana dan prasarana alat pelindung diri/Pakaian Huru Hara (PHH) dalam pengendalian massa yang saat ini berjumlah 26 unit dan kondisi yang layak pakai hanya 15 unit, dimana idealnya adalah 30 unit;
- 6. Masih minimnya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas pemadam kebakaran, seperti :
 - Baju anti api, baju anti panas, helm pemadam, masker, sarung tangan anti api dan peralatan lainnya.
 - Mobil/alat pemadam kebakaran yang mampu menjangkau bangunan bertingkat serta mobil pemadam kebakaran yang dapat masuk di jalan yang sempit.
- 7. Minimnya anggaran operasional lapangan khususnya dalam pengawasan dan pembinaan daerah-daerah rawan trantibum di seluruh wilayah Kabupaten Kolaka;
- 8. Belum terbentuknya UPT di kecamatan-kecamatan di seluruh wilayah Kabupaten Kolaka menjadi hambatan dalam jalur komando dalam kegiatan dan pelaksanaan taktis operasional antara Satpol PP Kabupaten dengan Pemerintah Kecamatan.

Beberapa permasalahan yang dihadapi pada urusan Trantibum pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Kolaka tahun 2025 antara lain sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia
Secara kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia di BPBD Kabupaten Kolaka masih kurang, khususnya yang memiliki keterampilan dan kualifikasi kebencanaan serta keuangan.
2. Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana
Kondisi sarana prasarana penanggulangan bencana yang dimiliki BPBD Kabupaten Kolaka masih sangat minim, khususnya yang berkaitan dengan masa darurat dan evakuasi.
3. Alokasi Dana
Ketersediaan alokasi dana yang berkaitan dengan kegiatan kebencanaan di Kabupaten Kolaka baik yang berasal dari APBD maupun APBN masih sangat minim, sehingga masih banyak program-program kebencanaan yang belum dapat dilaksanakan.





6. Urusan Sosial

A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan Sosial yang diperoleh Kabupaten Kolaka pada tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti.	23,90%	71,72%
2	Rehabilitasi sosial dasar Anak terlantar di luar panti.	2,40%	9,64%
3	Rehabilitasi sosial dasar Lanjut usia terlantar di luar panti.	7,70%	51,54%
4	Rehabilitasi sosial dasar Gelandangan pengemis di luar panti.	0%	100%
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota	100%	100%

B. Realisasi Belanja Urusan Sosial

Realisasi belanja urusan Sosial di Kabupaten Kolaka tahun 2025 sebesar Rp. 4.688.991.445,- dengan program unggulan sebagai berikut :

1. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti,
2. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial.

C. Permasalahan yang dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi pada urusan Sosial di Kabupaten Kolaka tahun 2025 antara lain sebagai berikut :

Faktor Internal :

- a. Keterbatasan Anggaran sehingga belum semua PMKS khususnya Lansia terlantar, terpenuhi Kebutuhannya.
- b. Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan sosial dan pelayanan administrasi yang dimiliki Dinas Sosial, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan belum mampu melayani masyarakat secara efektif, khususnya PMKS yang berada di daerah terpencil;
- c. Kualitas dan kuantitas SDM pengelola SPM di lapangan masih rendah, serta kurangnya pemahaman tentang teknis SPM.





- d. Data PPKS (lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas, gelandangan, anak terlantar) seringkali tidak update (pemutakhiran lambat)

Faktor Eksternal :

- a. Kurangnya informasi atau Sosialisasi tentang permensos No. 9 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal khusus dinas Sosial kab/kota sehingga dalam penyusunan Program kegiatan hal-hal yang menyangkut tentang penerapan SPM dirasakan kurang optimal.

3. HASIL EPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN SEBELUMNYA

1. Hasil EPPD Tahun sebelumnya
Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-2109 Tahun 2025, Kabupaten Kolaka berhasil mendapatkan hasil EPPD dengan skor kinerja **3,1799** dan status kinerja **Sedang**.
2. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kolaka Tahun 2024 di Kolaka berdasarkan Nomor 29.A/LHP/XIX.KDR/05/2025. Menurut opini BPK, Laporan Keuangan Kabupaten Kolaka menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Kolaka tanggal 31 Desember 2024, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, dan perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

4. RINGKASAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka (Audited/Unaudited) Tahun 2026 Realisasi Pendapatan Kabupaten Kolaka Tahun 2025 mencapai sebesar Rp. 1,711,429,689,829,22,- atau 98,05% dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kolaka tahun 2025 mencapai Rp. 1,668,080,248,868.00,- atau 94,33%.

Secara rinci, rincian realisasi anggaran pendapatan dan belanja pemerintah daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2025 berdasarkan jenis pendapatan dan jenis belanja dapat dilihat pada tabel berikut :





**Tabel Realisasi Anggaran Pendapatan
Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2025
Berdasarkan Jenis Pendapatan**

Kode Rekening	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
4.1.01	Pajak Daerah	111,237,722,935.00	112,459,278,053.86	98,05
4.1.02	Retribusi Daerah	19,915,241,145.00	16,358,209,094.00	82,14
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	47,204,330,379.00	49,175,001,744.00	104,17
4.1.04	Lain-lain PAD yang sah	117.442.827.069	110,349,002,769.36	93,36
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,382,723,575,000.00	1,369,833,224,521.00	99,07
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	66,905,865,273.00	53,254,973,647.00	79,60

**Tabel Realisasi Anggaran Belanja
Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2025
Berdasarkan Jenis Belanja**

Kode Rekening	Jenis Belanja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
5.1.01	Belanja Pegawai	586,802,559,312.00	543,466,475,830,00	92,61
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	580,695,422,021.00	548,693,217,368,00	94,49
5.1.05	Belanja Hibah	15,495,254,000.00	15,450,147,982,00	99,71
5.1.06	Bantuan Sosial	14,188,000,000.00	14,168,000000,00	99,86
5.2.01	Belanja Modal Tanah	6,123,020,000,00	5,371,064,715,00	87,72
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	81,099,339,614,00	78,853,079,982,00	97,23
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	109,176,800,442,00	106,057,887,984,00	97,14
5.2.04	Belanja Modal Jalan Jaringan dan Irigasi	153,697, 832,783,00	150,169,267,298,00	97,70
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3,975,592,674,00	3,965,409,874,00	99,74
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1,220,871,000,00	1,211,835,626,00	99,26
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	9,500,000,000,00	9,435,772,500,00	99,32
5.4.02	Belanja Transfer	206,297,601,755,00	191,238,089,709,00	92,70





5. INOVASI DAERAH

Berdasarkan Database Inovasi Daerah Kabupaten Kolaka memiliki inovasi daerah sebagai berikut :

NO	PELAKSANA INOVASI DAERAH	INOVASI DAERAH	KETERANGAN
1	Puskesmas Kolakaasi	SUMERKAH (Sulap Sampah Menjadi Berkah)	Terintegrasi dengan layanan kesehatan, menjadikan Puskesmas bukan hanya tempat pelayanan medis tetapi juga pusat edukasi lingkungan. Memanfaatkan sumber daya lokal, seperti kader, karang taruna, dan masyarakat umum untuk menciptakan solusi berkelanjutan. Menciptakan nilai ekonomi dari sampah, melalui daur ulang menjadi produk kreatif dan kompos yang bisa dijual atau digunakan kembali. Mudah direplikasi oleh fasilitas kesehatan lainnya karena menggunakan metode sederhana, murah, dan berbasis komunitas. Inovasi SUMERKAH adalah gagasan pertama di wilayah Kabupaten Kolaka yang mengintegrasikan konsep 3R dalam lingkungan layanan kesehatan dengan pola pelibatan masyarakat secara aktif dan konsisten. Program ini menjadikan sampah bukan hanya masalah, tetapi peluang berkah yang memberikan manfaat lingkungan, sosial, dan ekonomi secara sekaligus. Inovasi SUMERKAH merupakan solusi terpadu dan berkelanjutan yang mengintegrasikan pengelolaan sampah, peningkatan kebersihan lingkungan, dan pencegahan





			<p>stunting di Kabupaten Kolaka. Program ini tidak hanya berfokus pada aspek lingkungan, tetapi juga menghasilkan manfaat langsung bagi kesehatan masyarakat melalui pemenuhan pangan bergizi. Melalui pendekatan Reduce, Reuse, dan Recycle (3R) serta Bank Sampah berbasis insentif pangan, SUMERKAH berhasil mengubah sampah menjadi berkah dengan mengembalikannya dalam bentuk makanan bergizi bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan stunting. Dengan implementasi yang tepat, inovasi ini mampu : Menurunkan angka stunting melalui peningkatan konsumsi buah dan sayur. Meningkatkan kebersihan lingkungan sekaligus mengurangi risiko penyakit seperti Demam Berdarah Dengue (DBD). Memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui pengelolaan sampah yang produktif. Memperkuat peran komunitas dalam pengelolaan lingkungan serta menciptakan sistem yang berkelanjutan. Menjadi model yang dapat direplikasi di daerah lain, berkontribusi terhadap kebijakan nasional terkait kesehatan dan lingkungan.</p>
2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kolaka	OPERASI EMAS	Keberadaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kolaka diatur dalam Peraturan Bupati Kolaka Nomor 22 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kolaka dan





		<p>salah satu Bidang yang ada adalah Bidang Pengembangan Perdagangan dan di Pasal 22 tercantum salah satu fungsi yang diemban adalah penyelenggaraan operasi pasar / pasar murah dalam rangka stabilitasi harga pangan pokok wilayah kerjanya yang bertujuan untuk menjaga inflasi tetap stabil di Kabupaten Kolaka. Dalam melaksanakan tugasnya pada penyelenggaraan Pasar Murah, Bidang Pengembangan Perdagangan menemukan beberapa masalah terkait proses pelayanan yang masih belum efektif dan efisien sehingga memicu kinerja aparatur dalam melakukan terobosan dan inovasi dalam pelayanan melalui sistem informasi berbasis elektronik. Seperti diketahui bahwa sistem pencatatan manual atau konvensional membutuhkan waktu yang relatif lama, juga membutuhkan banyak peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan. Melihat dari permasalahan tersebut, maka inisiator akan membangun suatu terobosan baru dalam pelayanan, yaitu pelayanan berbasis sistem informasi yang sudah terkomputerisasi sehingga memudahkan petugas giat Pasar Murah menginput, mengolah, memverifikasi dan memvalidasi, serta menyimpan data peserta (masyarakat yang berbelanja) di giat Pasar Murah. Dasar latar belakang tersebut isu strategis yang bisa</p>
--	--	--





			diangkat adalah kurang optimalnya pelayanan Pasar Murah dan dari isu tersebut inisiator mengangkat inovasi dengan nama "OPERASI EMAS".
3	Puskesmas Kolakaasi	SAHABAT CERIA (Sarana Anak Hebat dan Bermain Aman Terpadu – Cerdas, Religius, Amanah	inovasi ini dengan judul "SAHABAT CERIA (Sarana Anak Hebat dan Bermain Aman Terpadu – Cerdas, Religius, Amanah)" sebagai bagian dari upaya mewujudkan Puskesmas Ramah Anak di wilayah kerja BLUD UPTD Puskesmas Kolakaasi. Inovasi ini lahir dari kepedulian terhadap pentingnya lingkungan pelayanan kesehatan yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang anak secara holistik. Melalui pendekatan integratif yang melibatkan berbagai unsur—pelayanan kesehatan, pendidikan karakter, sarana bermain, dan perlindungan anak—kami berharap inovasi SAHABAT CERIA dapat menjadi inspirasi dalam membentuk generasi yang sehat, cerdas, dan berakhlak mulia. Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung tersusunnya makalah ini, khususnya Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka, Pemerintah Desa dan Kelurahan, sekolah-sekolah, orang tua, serta seluruh tim Puskesmas Kolakaasi yang telah berkontribusi dalam pengembangan dan pelaksanaan inovasi ini. Kami menyadari bahwa makalah ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan





			<p>inovasi dan layanan kami di masa yang akan datang. Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan anak dan menjadi bagian dari kontribusi nyata dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan dasar memiliki peran penting dalam mewujudkan pemenuhan hak anak atas kesehatan dan perlindungan. Berdasarkan konvensi hak anak dan regulasi nasional seperti Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), pelayanan kesehatan harus responsif terhadap kebutuhan anak. Sayangnya, fasilitas pelayanan kesehatan di tingkat puskesmas belum seluruhnya ramah anak. Minimnya ruang ramah anak, keterbatasan sarana bermain edukatif, serta kurangnya pendekatan psikososial membuat anak merasa takut atau tidak nyaman saat mengakses layanan. Oleh karena itu, BLUD UPTD Puskesmas Kolakaasi menghadirkan inovasi "SAHABAT CERIA" sebagai jawaban atas kebutuhan tersebut</p>
4	Badan Riset dan Inovasi Daerah kab. Kolaka	PRODUK INOVASI PANGAN YANG LAYAK DI ADOPSI UNTUK PELAYANAN	Produk Sinole dan Jepa Sagu memiliki umur simpan yang pendek, sehingga harus segera dikonsumsi dalam satu atau dua hari saja. Selain itu, produk Sinole dan Jepa Sagu tidak bisa dibawa ke tempat lain





		GIZI BAGI MASYARAKAT DI KABUPATEN KOLAKA	dalam waktu lama. Hal ini dikarenakan Sinole dan Jepa Sagu mudah mengalami kemunduran mutu seperti timbulnya bau dan rasa masam pada produk yang selanjutnya dapat ditumbuhi jamur dan tekstur Sinole dan Jepa Sagu menjadi bantat/padat keras. Upaya untuk memperpanjang masa simpan Sinole dan Jepa Sagu telah dilakukan beberapa penelitian sebelumnya dengan menjadikan produk Sinole dan Jepa Sagu kering, namun terdapat beberapa kelemahan yaitu Sinole dan Jepa Sagu dalam bentuk kering perlu perlakuan mengukus kembali untuk siap dikonsumsi. Selain itu, proses pengeringan menyebabkan terjadinya perubahan warna, tekstur dan aroma pada Sinole dan Jepa Sagu. Upaya untuk mengatasi kelemahan tersebut adalah dengan membuat produk Sinole dan Jepa Sagu yang dikemas vakum dan diproses sterilisasi untuk memperpanjang umur simpan Sinole dan Jepa Sagu dan memudahkan untuk dikonsumsi segar atau ready to eat. Kelebihan inovasi ini adalah produk dibuat dengan ukuran standar 100 g sehingga dapat dikonsumsi sesuai kebutuhan, dikemas vakum dengan kemasan aluminium foil khusus untuk retorch, proses sterilisasi menjadikan produk dapat awet disimpan di suhu kamar dan memiliki umur simpan yang lebih lama dibandingkan produk tanpa sterilisasi. Produk Sinole dan Jepa
--	--	--	--





			<p>Sagu berkemasan vakum menjadikan tampilan produk lebih higienis, menarik dan mudah dibawa. Sehingga diharapkan produk ini lebih bernilai ekonomis untuk dikembangkan sebagai industry makanan lokal yang dapat dikembangkan untuk produk PMT makanan lokal untuk pencegahan gizi kurang di daerah lokal yang rentan mengalami masalah gizi kurang, terutama daerah pedesaan di kabupaten Kolaka Propinsi Sulawesi Tenggara. Keunggulan dari rancangan formulasi ini adalah produk memiliki nilai gizi protein yang lebih tinggi dibandingkan Sinole dan Jepa Sagu biasa, produk juga memiliki nilai organoleptik yang lebih baik karena adanya formulasi dengan tepung tinggi amilosa. Produk Sinole dan Jepa Sagu sudah biasa dikonsumsi oleh Masyarakat sehingga dapat dengan mudah diterima masyarakat, begitu juga dengan tambahan isian tuna wortel yang ditambahkan dengan berbagai formulasi yang telah melalui uji pendahuluan telah diterima dan disukai oleh panelis uji. Formulasi Sinole dan Jepa Sagu yang ditambahkan isi ikan tuna dan wortel untuk melengkapi nilai gizi yang diperlukan untuk pencegahan gizi kurang.</p>
5	Puskesmas Watubangga	IDE JAMU (Input Data Evaluasi Jadi Mudah)	Pelaksanaan inovasi dalam lingkungan kerja perlu di optimalkan guna meningkatkan produktifitas dan memaksimalkan hasil kerja yang





			<p>di inginkan. puskesmas Watubangga memiliki tata nilai yakni "WTB" dimana huruf 'W' dalam tata nilai tersebut memiliki arti yakni 'Wawasan Luas dan Profesional' yang enujukan Puskesmas Watubangga senantiasa mendukung kegiatan inovasi yang ada dilingkungan kerja guna dapat membentuk lingkungan kerja manajemen tata kelola pemerintahan yang baik dan memberikan pelayanan yang memuaskan untuk masyarakat dan siste pelaporan yang tepat, efektif, dan efisien. Puskesmas Watubangga sebagai salah satu unit milik pemerintah diruang lingkup kesehatan tentunya memiliki manajemen sendiri termasuk mengurus standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintahan . staff yang bekerja di puskesmas watubangga di dominasi oleh tenaga kesehatan yang selain memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat juga memiliki tanggung jawab dalam mengatur manajemen puskesmas seperti halnya penanggung jawab UKM dan UKP. Untuk memiliki manajemen tat kelola Evaluasi Triwulan ataupn Evaluasi semester yang baik sembari memberikan sehingga kedua kegiatan tersebut dapat berjalan dengan optimal dan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan.</p>
--	--	--	---





6	Puskesmas Iwoimendaa	Antar Jemput Ibu Bersalin (ANJELI)	<p>Dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan Puskesmas Iwoimendaa sebagai bagian dari implementasi visi dan motto pelayanan, baik Upaya Kesehatan masyarakat (UKM) maupun Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) serta sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan harapan masyarakat untuk memperbaiki pencapaian cakupan persalinan di fasilitas kesehatan dan menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) bukan hanya merupakan indikator kesehatan ibu dan anak, namun juga dapat menggambarkan tingkat akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, efisien dan efektifitas dalam pengelolaan program kesehatan. Penurunan angka kematian Ibu dan Bayi menggambarkan keberhasilan dalam sektor kesehatan, karena hal tersebut menentukan derajat kesehatan masyarakat dalam menggambarkan kualitas kesehatan ibu dan anak di Indonesia. Banyak faktor yang mempengaruhi angka kematian Ibu dan Bayi diantaranya adalah jarak dan sarana transportasi serta biaya yang mengakibatkan terjadinya 3T yaitu Terlambat mengambil Keputusan, Terlambat sampai ke fasilitas kesehatan, dan Terlambat mendapat penanganan. Puskesmas Iwoimendaa memiliki cakupan wilayah yang cukup luas dengan Pustu serta Polindes yang</p>
---	----------------------	------------------------------------	--





			<p>tersebar di Desa sekecamatan Iwoimendaa. Wilayah kerja UPTD Puskesmas Iwoimendaa terdiri dari 10 desa, 5 desa diantaranya memiliki jarak yang cukup jauh dari puskesmas, sehingga masih ada persalinan yang dilakukan di rumah karena minimnya kendaraan pribadi seperti mobil yang dimiliki masyarakat sehingga menyebabkan rendahnya pencapaian persalinan di fasilitas kesehatan. Oleh karena itu, Puskesmas Iwoimendaa menciptakan inovasi yang diberi nama ANJELI (Antar Jemput Ibu Bersalin).</p>
7	Badan Riset dan Inovasi Daerah kab. Kolaka	Aplikasi SI-RISDA BERAMAL	<p>Aksi perubahan SI-RISDA BERAMAL (Sistem Inovasi Riset Daerah) yang diinisiasi oleh Badan Riset Daerah (Brida) Kabupaten Kolaka merupakan sebuah langkah strategis dalam mendorong terwujudnya tata kelola inovasi daerah yang terintegrasi, transparan, dan akuntabel. Melalui pengembangan sistem ini, diharapkan seluruh data, informasi, dan aktivitas inovasi yang ada di Kabupaten Kolaka dapat terdokumentasi dengan baik, mudah diakses, serta bermanfaat bagi perangkat daerah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, maupun stakeholder lainnya.</p> <p>Implementasi aksi perubahan ini sejalan dengan semangat reformasi birokrasi, khususnya pada area penguatan organisasi,</p>





			<p>pengembangan sumber daya manusia, peningkatan transparansi informasi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan adanya sistem inovasi yang terintegrasi, Brida Kabupaten Kolaka dapat memperkuat peran sebagai motor penggerak inovasi sekaligus pusat data dan informasi inovasi daerah. Melalui kolaborasi yang erat antara pimpinan, perangkat daerah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat, aksi perubahan ini diharapkan menjadi salah satu instrumen untuk mendukung pencapaian visi Kabupaten Kolaka dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik.</p> <p>Dengan demikian, SI-RISDA BERAMAL bukan hanya sebatas system informasi, tetapi juga merupakan bentuk komitmen dan budaya kerja baru di Brida Kabupaten Kolaka dalam mendorong lahirnya inovasi-inovasi daerah yang berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.</p>
8	Badan Riset dan Inovasi Daerah kab. Kolaka	Inovasi Bioindikator Kualitas Air Laut Pesisir Pantai Di Kabupaten Kolaka Berbasis Artificial Intelligence Of Things (Aiot)	inovasi bio indikator kualitas air laut berbasis artificial intelligence of things (AIoT) menjanjikan sebuah lompatan tranformatif dalam cara kita memantau dan melindungi ekosistem laut yang berharga. Dengan menggabungkan kepekaan alamiah organisme hidup sebagai indikator dengan kecerdasan buatan dan kemampuan konektivitas IoT ,





			<p>kita membuka pintu menuju sistem pemantau yang lebih efisien, akurat, real-time, dan berskala luas. inisiatif ini bukan hanya tentang pengembangan teknologi semata namun juga tentang membangun kolaborasi yang erat antara para peneliti, industri, pemerintah, komunitas dan masyarakat luas. Sinergi dari berbagai keahlian dan perspektif ini akan menjadi motor penggerak inovasi, memastikan bahwa solusi yang dihasilkan relevan, berkelanjutan dan memberikan dampak positif yang nyata bagi lingkungan laut dan kehidupan yang bergantung padanya.</p> <p>Meskipun tantangan dalam pengembangan dan implementasi teknologi ini tentu ada, potensi manfaatnya sangat besar. Kemampuan untuk mendeteksi perubahan kualitas air secara dini, memprediksi tren, dan memberikan informasi yang akurat untuk pengambilan keputusan akan memberdayakan kita untuk mengelola sumber daya laut secara bijaksana, memitigasi dampak pencemaran dan melestarikan keanekaragaman hayati laut untuk generasi mendatang. Inovasi bioIndikator kualitas air laut berbasis AIoT bukan lagi sekedar visi melainkan sebuah langkah nyata menuju laut yang lebih sehat dan berkelanjutan. Mari kita terus</p>
--	--	--	---





			berkolaborasi, berinovasi dan mewujudkan potensi penuh dari teknologi ini demi masa depan lautan kita.
9	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	SADAR UMKM (Satu Data Integrasi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) Kabupaten Kolaka	Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Bupati Kolaka Nomor 13 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kolaka yaitu Perumusan, Pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan daerah dibidang Kelembagaan dan Pengawasan, Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Kolaka. Salah satu Tugas dan Fungsi tersebut adalah Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terkait pelaporan data Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kolaka rutin melaksanakan Pendataan Koperasi dan UMKM. Dalam melakukan pendataan Database Koperasi dan UMKM baik secara Kualitas maupun secara Kuantitas. Dalam pelaksanaan kegiatan pendataan, Dinas Koperasi dan UKM kabupaten Kolaka masih melakukan Pendataan secara Manual dengan menugaskan ASN / Petugas di lapangan. Pendataan yang dilaksanakan secara manual ini tentu masih terdapat beberapa kendala –





		<p>kendala yang dihadapi antara lain : Terbatasnya petugas pendata dilapangan, Koperasi dan UMKM yang akan di data terkadang tidak berada di tempat, Jarak beberapa pelaku Koperasi dan UMKM yang sulit di jangkau petugas, validasi dan rekapitulasi data membutuhkan waktu yang cukup lama, infrastruktur menuju lokasi pendataan terkadang sulit dilalui kendaraan, dan lain sebagainya. Melihat Kondisi dan permasalahan tersebut, diperlukan strategi dan inovasi yang tepat. Agar kondisi ideal organisasi dalam rangka mencapai kinerja dibutuhkan strategi yang efektif dan efisien. Melihat hal tersebut dibutuhkan sumber daya manusia, sarana dan infrastruktur yang dapat memudahkan dilakukan pendataan melalui teknologi digitalisasi, sehingga pendataan dapat dilaksanakan secara cepat, tepat dan valid. Pada akhirnya seluruh kegiatan pendataan Koperasi dan UMKM akan dilaksanakan secara digitalisasi, dapat dilaksanakan dimana saja, kapan saja dengan memanfaatkan teknologi dan jaringan, tanpa mengurangi kebenaran data dari para pelaku Koperasi dan UMKM kabupaten Kolaka. Satu Data Integrasi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Kolaka atau di singkat SADAR UMKM ini akan menjadi solusi yang tepat guna penyediaan data Koperasi dan UMKM yang akurat.</p>
--	--	--





10	Puskesmas Polinggona	Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) Kampung KB Dahlia Desa Tanggeau	DASHAT atau Dapur Sehat Atasi Stunting merupakan program yang dikembangkan oleh BKKBN Pusat dalam rangka mencegah terjadinya stunting di desa. Desa Tanggeau sebagai salah satu Kampung KB yang ada di Kabupaten Kolaka melakukan kegiatan Dashat dengan cara melakukan praktik pembuatan makanan bergizi yang kekinian berbahan dasar dari bahan pangan lokal yang ada di desa. Manfaat yang diperoleh diantaranya mendapatkan makanan yang murah tapi bergizi, meningkatkan nilai gizi makanan, sebagai ketahanan pangan keluarga, dan mencegah stunting. Dari pelaksanaan kegiatan Dashat di Desa yang telah dilakukan lomba tingkat nasional terdapat beberapa menu andalan, namun yang paling populer adalah Puding Jagung, Puding Kelor, dan Abon Lele.
11	Dinas Komunikasi dan Informasi	Sistem Informasi Desa (SID)	Pelayanan Publik di tingkat Desa/Kelurahan (terkhusus pengurusan persuratan Masyarakat) di lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka yang berjalan sebelum inovasi ini diterapkan, masih berupa manual, yang mana Masyarakat mengunjungi langsung kantor Desa/Kelurahan sesuai domisili, untuk mengajukan surat keterangan yang diinginkan Berangkat dari permasalahan tersebut, pada tahun





			<p>2020 seorang Lurah pada masa jabatannya menginisiasi terbitnya Sistem Informasi Desa (SID), dengan tujuan awal inovasinya hanya cukup diimplementasikan di lingkup Kelurahan saja. Namun setelah SID dikembangkan pada tahap-tahap awal, Dinas Komunikasi dan Informatika menilai SID mempunyai potensi untuk dipergunakan oleh seluruh Desa/Kel di Kolaka.</p> <p>SID memungkinkan Masyarakat untuk mengajukan permohonan surat secara online, dengan memastikan data penduduknya sudah terlebih dahulu di Aplikasi SIMPADU (Sistem Informasi Kependudukan yang dikembangkan secara mandiri oleh Diskominfo dan dipergunakan oleh Kantor Desa/Kelurahan). SID telah terintegrasi dengan Aplikasi SIMPADU dengan menggunakan API melalui Sistem Penghubung Layanan (SPLP) Kementerian Komunikasi dan Informatika. Apabila Masyarakat telah terdaftar, maka data penduduk yang bersangkutan akan otomatis muncul, dan Masyarakat tinggal melakukan permohonan. Setelah surat selesai diajukan, akan diberikan kode referensi sebagai pegangan bagi nasabah bahwa permohonannya telah diterima. Berikutnya Perangkat Desa/Kelurahan akan melakukan tinjauan permohonan melalui aplikasi, selanjutnya dilakukan disposisi kepada pejabat penanda</p>
--	--	--	--





			tangan, yang pada akhirnya surat yang telah ditandatangani akan terbit dan Masyarakat akan diinfokan oleh Perangkat Desa/Kel.
12	Puskesmas Samaturu	CEGAH STUNTING (SIBOLAN)	Latar belakang inovasi cegah stunting karena masih adanya anak yang teridentifikasi stunting di Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka. Namun dipihak lain terdapat sumber pangan lokal yang bisa dijadikan bahan untuk mengurangi bahkan mencegah adanya gizi buruk yang bisa menyebabkan stunting. Adapun kendala yang dihadapi dilapangan adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat utamanya orang tua yang peduli dengan tumbuh kembang/Kesehatan anak mereka sendiri dan masih rendahnya kreatifitas dari masyarakat untuk mengolah bahan pangan yang ada disekitar mereka. Sebagian besar masyarakat mungkin belum memahami istilah yang disebut stunting. Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktuyang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggibadan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya.Kondisi tubuh anak yang pendek seringkali dikatakan sebagai faktor keturunan (genetik) dari kedua orang tuanya, sehingga masyarakat banyak yang hanya menerima tanpa berbuat apa-apa untuk





			mencegahnya. Padahal seperti kita ketahui, genetika merupakan faktor determinan kesehatan yang paling kecil pengaruhnya bila dibandingkan dengan faktor perilaku, lingkungan (sosial, ekonomi, budaya, politik), dan pelayanan kesehatan. Dengan kata lain, stunting merupakan masalah yang sebenarnya bisa dicegah.
13	Dinas Pemukiman dan Kawasan Kumuh.	Sistem Informasi Kawasan Permukiman Kumuh (Si-Kawanku)	Identifikasi permukiman kumuh merupakan langkah awal untuk menentukan arah kebijakan pemerintah kabupaten kolaka yang akan dilaksanakan guna tercapainya visi dan misi yang ditetapkan. Untuk mendukung Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai OPD pelaksana dibutuhkan data yang akurat dan dapat diakses dengan mudah dan cepat. Inovasi ini bertujuan untuk terpetakannya Data Kawasan Permukiman Kumuh Melalui WebGis dan Tersedianya sarana WebGis untuk mengetahui kondisi statistik dan wilayah yang menjadi target besar perencanaan pembangunan. Sehingga Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai perumahan kumuh dan kawasan permukiman kumuh berbasis WebGis.

